

BAB I

PENDAHULUAN .

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia pada saat ini sedang mengalami perubahan diseluruh kehidupan dan diharapkan seluruh Warga Negara Indonesia untuk berupaya melakukan penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan dunia khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Alam. Disamping itu pemerintah dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah dan seluruh jajaran organisasi pemerintah yang lain dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas kerja. Karena hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap fungsi dan kedudukan aparatur pemerintah itu sendiri sebagai abdi masyarakat, yang dikaitkan dengan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mensukseskan pembangunan.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah luas, dan terdiri dari banyak pulau yang tersebar dan terpisahkan oleh lautan. Maka tidaklah mungkin bagi pemerintah pusat untuk dapat mengatur kesemuanya sehingga pembangunan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan melihat kondisi yang demikian itulah maka dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah. Salah satunya yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang

dibuat di era reformasi yang lebih mengutamakan kepada asas desentralisasi.¹ Pada tahun 2004 tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2004 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tersebut disempurnakan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penjelasan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada dasar pemikiran butir (a) dikatakan Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kata lain Undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan dan juga kewenangan untuk mengelola segala potensi yang ada di daerah sesuai dengan kebutuhannya. Maka hal ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana agar pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan mengandalkan segala potensi yang dimilikinya baik

¹ Rozali Abdullah, SH, "Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Isu Federalisme Sebagai Suatu
13

potensi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam. Salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan adalah harus adanya sebuah modal, dalam hal ini adalah keuangan daerah harus mencukupi untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan "Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri."² Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Syamsi yang menempatkan keuangan Daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³ Dari pendapat tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya atau keuangan yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.

Hal tersebut juga sudah diatur dengan Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan

² S. Pamudji, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1980, hlm. 61-62.

³ Ibnu Syamsi, *Perimbangan Keuangan Negara*, Penebar, Jakarta, 1983.

Pemerintah Daerah secara proposional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan Negara Indonesia berasal dari dua sektor yaitu Migas dan Non-Migas, karena keterbatasan sumber Migas, maka sangatlah tidak mungkin jika pemerintah Indonesia masih mengandalkan dari sektor Migas tersebut sebagai sumber pemasukan Negara. Dan untuk membantu sumber pemasukan negara, pemerintah telah melakukan usaha pengembangan sektor-sektor Non-Migas untuk membantu pemasukan devisa Negara yang sedikit macet karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Salah satu pembangunan di sektor Non-Migas adalah dari sektor pariwisata. Dengan pertimbangan yang logis dan realistis bahwa bangsa Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar dari sektor pariwisata ini, oleh karena badai krisis moneter melanda bangsa ini membuat suasana sosial politik menjadi tidak stabil yang juga membuat sektor pariwisata semakin terpuruk dan menyebabkan jumlah kunjungan ketempat wisata menjadi

Keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dijelaskan sebagai pengembangan pariwisata di Indonesia yang pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Makin berkurangnya peranan minyak sebagai devisa jika dibanding dengan waktu yang lalu.
- b. Merosotnya nilai-nilai ekspor disektor Non-Migas.
- c. Prospek pariwisata yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan secara konsisten.
- d. Besarnya potensi yang kita miliki bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.⁴

Dalam GBHN tahun 1999 – 2004 disebutkan bahwa visi yang merupakan tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu dan teknologi serta memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin.⁵

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperjelas dengan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan propinsi sebagai daerah otonom yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah propinsi dan kabupaten sebagai

⁴ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta, 1985, Hal.57.

⁵

daerah otonom diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangga daerahnya sesuai potensi wilayah yang dimiliki.

Sebagai daerah otonom dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka untuk level pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun kota berhak mengurus rumah tangganya sendiri baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun untuk menggali sumber keuangan di daerah. Dalam mengurus rumah tangganya pastilah suatu daerah tidak lepas dari persoalan pendanaan sebagai sumber pembiayaan.

Berkaitan dengan masalah pendanaan di daerah maka tidak lepas dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan sumber keuangan?, karena semakin besar pendapatan suatu daerah maka akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Irawan Soejito bahwa semakin besar keuntungan daerah maka besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya dan kesejahteraan pada umumnya dan bagi penduduk atau dengan kata lain semakin besar kemampuan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.⁶

⁶ Irawan Soejito, *Hukum dan Politik Daerah*, Bina Aksara, 1990, Jakarta, Hlm. 59

Adapun yang berkaitan dengan keuangan daerah ketentuan perundangan yang mengaturnya adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 29.

1. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber diwilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil penerimaan badan usaha milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 3. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk menggali dan mengupayakan potensi yang ada di daerah untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya. Agar potensi yang ada di daerah dapat dioptimalkan hasilnya oleh pemerintah daerah, maka dari itu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah agar mempunyai perencanaan strategis untuk melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber yang potensial maupun kurang potensial untuk dijadikan obyek sumber pendapatan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya perencanaan strategis tersebut diharapkan akan dapat dipetakan sektor apa saja yang yang sekiranya dapat memberikan kontribusi yang baik bagi daerah. Dengan dilepasnya suatu daerah dari sebagian besar tanggung jawab pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan sendiri peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya

Tabel 1.1
Data Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2002 s/d 2005

No	Jenis Pendapatan Daerah	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005
A.	Total APBD	326.863.592.500	374.536.209.730	343.353.596.484	373.965.187.752
B.	Jumlah PAD	23.603.055.603	28.300.566.863	28.626.012.650	40.757.559.501
	I. Pajak Daerah.	3.224.254.155	4.414.817.548	4.793.432.487	5.792.993.382
	II. Retribusi Daerah.	12.806.252.194	17.306.708.022	17.953.933.817	26.713.862.209
	-Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	112.579.850	164.404.540	171.377.870	186.366.950
	III. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.	294.700.000	717.338.820	903.296.250	3.543.893.310
	IV. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	7.277.849.254	5.861.702.473	4.975.350.096	4.715.810.600
C.	Dana Perimbangan	246.560.871.200	277.927.564.201	293.377.533.617	314.842.994.961
D.	Lain-Lain Penerimaan Yang Sah	13.615.033.381	22.259.205.083	21.350.050.217	18.364.633.290
E.	Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu	43.084.632.316	46.048.873.583		

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) 2005.

Dalam kerangka otonomi daerah, daerah otonom dalam hal ini Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu mengelola perekonomian dan segala potensi daerah yang ada. Kabupaten Purbalingga sangat potensial

Purbalingga yang beraneka ragam memberikan keindahan alam yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai obyek wisata. Adapun potensi wisata yang terdapat di Purbalingga sebagian besar merupakan wisata alam dan sebagian lagi merupakan wisata industri dan wisata umum.

Dibidang hasil pertanian, Purbalingga merupakan penghasil padi dan buah-buahan. Purbalingga dikenal sebagai penghasil buah duku yang sangat manis yaitu duku Kalikajar. Purbalingga juga merupakan daerah penghasil sayur-sayuran yaitu berasal dari Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja. Hasil sayur ini merupakan komoditi pasar yang sangat bagus. Setiap hari, para petani selalu memasok sayuran keluar kota.

Disisi lain, industri rumah tangga juga sangat potensial di Kabupaten Purbalingga. Adapun produk industri rumah tangga yang dihasilkan antara lain adalah knalpot dari kampung Sayangan, sapu glagah dari Karangbanjar, panci (alat rumah tangga) dari Kertanegara dan kasur dari Wanalaya. Produk hasil industri rumah tangga yang berkembang pesat adalah knalpot dan kasur dimana dua produk tersebut mampu memasok hingga keluar Jawa.

Dibidang industri modern, di Purbalingga terdapat sekitar 12 pabrik rambut milik perusahaan Korea. Dari pabrik tersebut dihasilkan rambut palsu (wig) siap pakai, rambut palsu (wig) setengah jadi, bulu mata palsu, eye cash dan hair pice. Kesemuanya merupakan komoditas andalan ekspor Kabupaten Purbalingga. Selain itu juga terdapat pabrik rokok berskala Nasional yaitu PT. HM Sampoerna dan beberapa pabrik kayu lapis dan mie telur

Didasarkan pada potensi wisata yang tinggi di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menempatkan sektor usaha pariwisata pada salah satu skala prioritas pembangunan, dengan pertimbangan bahwa usaha-usaha yang selalu menetap pada satu lokasi dan tidak berpindah-pindah sehingga dapat menggiatkan aktivitas perekonomian disekitar lokasi wisata. Pembangunan dan pengelolaan sektor usaha wisata di Kabupaten Purbalingga menitik beratkan pada usaha pengembangan pariwisata.

Dengan pengembangan pariwisata, diharapkan pembangunan usaha sektor pariwisata dapat memberi manfaat baik bagi pemerintah daerah, dan juga bagi masyarakat.

Manfaat Pengembangan Pariwisata bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Merangsang pertumbuhan usaha ekonomi disektor lain.
- Pariwisata sebagai wahana untuk memperkenalkan kebudayaan dan seni Purbalingga serta produk yang dihasilkan Purbalingga.

Sedangkan bagi masyarakat, pengembangan usaha sektor wisata dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- Rekreasi
- Bertambahnya peluang usaha
- Bertambahnya kesempatan kerja.

Pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang mendasari kebijakan

... .. Kabupaten Purbalingga untuk mengembangkan dan

mengelola pariwisata. Dengan demikian pengembangana sektor usaha wisata diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian sektor lain untuk meningkatkan laju perekonomian masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Purbalingga tentunya.

Didasarkan pada kondisi alam Purbalingga, potensi wisata Kabupaten Purbalingga tergolong tinggi. Sebagian besar sumber potensi wisata yang dimiliki merupakan potensi wisata alam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 tercatat 18 potensi wisata yang dimiliki dan dimungkinkan bisa dikembangkan menjadi obyek wisata. Adapun data jumlah obyek wisata yang telah resmi dikelola serta peningkatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Data Jumlah Obyek Wisata
Berdasarkan Kepemilikan dan Pengelolaan

No	Hak milik dan pengelolaan	Jumlah
1	Milik PEMDA dan dikelola oleh PEMDA	8 obyek wisata
2	Milik Swasta dan dikelola oleh Swasta	2 obyek wisata
3	Milik PEMDA dan dikelola oleh Swasta	1 obyek wisata
	Jumlah	11 obyek wisata

Tabel 1.3
Peningkatan Jumlah Obyek Wisata Kabupaten Purbalingga
Tahun 2002 – 2005

No	Hak Milik dan Pengelolaan	Jumlah Obyek Wisata		Peningkatan
		2002	2005	
1	Milik PEMDA dan dikelola oleh PEMDA	6	8	2
2	Milik Swasta dan dikelola oleh Swasta	1	2	1
3	Milik PEMDA dan dikelola oleh Swasta	0	1	1
	Jumlah	7	11	4

Sumber : Dishubpar Kabupaten Purbalingga 2005

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat digambarkan bahwa dari 18 potensi wisata yang tercatat, 11 obyek wisata secara resmi dikelola sebagai usaha ekonomi sektor pariwisata. Dari 11 obyek wisata tersebut 9 diantaranya merupakan milik PEMDA dan 2 obyek wisata milik swasta (perorangan). Dari 9 obyek wisata milik PEMDA, 8 diantaranya dikelola oleh PEMDA dan 1 obyek wisata dikelola oleh swasta.

Pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah peningkatan jumlah obyek wisata, peningkatan sarana wisata di dalam obyek wisata serta peningkatan prasarana yang mendukung aktivitas pariwisata seperti hotel, rumah makan, tempat hiburan dan biro perjalanan. Sasaran pengembangan pariwisata tersebut diatas menitik beratkan pada sisi kuantitas maupun kualitasnya guna menciptakan kemudahan dan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang pada akhirnya

.....

wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga pada saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Potensi Wisata Kabupaten Purbalingga

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi
1.	Obyek wisata Goa Lawa	Kec. Karangreja.
2.	Pendakian Gunung Slamet	Kec. Karangreja.
3.	Ardi Lawet	Kec. Rembang.
4.	Desa Wisata Karangbanjar	Kec. Bojongsari.
5.	Pemandian Tirta Asri Walik	Kec. Kutasari.
6.	Bumi Perkemahan Munjul Luhur	Kec. Bojongsari.
7.	Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman	Kec. Rembang.
8.	Aquarium Purbasari Pancuran Mas	Kec. Padamara.
9.	Taman Curug Gringsing	Kota Purbalingga.
10.	Obyek Wisata Arung Jeram Sungai Klawing	Purbalingga.
11.	Obyek Wisata Taman Kota Komplek Stadion Wasesa	Kota Purbalingga.
12.	Perpustakaan Umum dan Museum Budaya (Prof. Dr. R Soegardha Poerbakawtja)	Pusat Kota Purbalingga.
13.	Curug Nini	Kec. Mrebet.
14.	Curug Ciputat	Kec. Bobotsari.
15.	Curug Silintang dan Silawang	Kec Karangreja.
16.	Curug Kalikarang	Kec Rembang.
17.	Obyek Wisata Congot	Kec. Kemangkon.
18.	Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG)	Kec. Bojongsari.

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga 2005

Dari 18 potensi wisata yang tercatat seperti pada tabel I.4, terdapat 11 obyek wisata yang secara resmi dikelola sebagai obyek wisata dari potensi

wisata yang ada. Adapun obyek wisata tersebut adalah sebagai berikut :

prasarana pendukung pariwisata di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Data Jumlah Prasarana Pendukung Pariwisata
di Kabupaten Purbalingga.

No.	Jenis	Jumlah
1.	Hotel	7
2.	Restorant	17

Sumber : Dishubpar Kabupaten Purbalingga : 2005

Jumlah prasarana pendukung pariwisata yang tertera pada tabel 1.6 adalah jenis prasarana yang terdaftar atau telah memperoleh ijin dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Namun demikian masih terdapat banyak jenis prasarana pariwisata yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga terutama jenis restoran atau rumah makan.

Melihat data tersebut diatas maka dapat digambarkan bahwa masih terdapat masalah pada usaha pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Melalui Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 24 Tahun 2001 berisi tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas-dinas daerah, dinas Perhubungan dan Pariwisata ditunjuk sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang perhubungan dan pariwisata dalam kerangka otonomi daerah (SK

Adapun fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Sub Dinas Pariwisata berdasarkan SK Bupati Purbalingga No. 24 Tahun 2001 Pasal 94 adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan pembinaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum, menyiapkan perijinan dibidang pariwisata, memantau dan mengevaluasi obyek wisata;
2. Penyiapan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata, menyiapkan perijinan dibidang prasarana, akomodasi, rumah makan, bar, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
3. Penyiapan pembinaan dan pengembangan pemasaran, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran serta penyuluhan pariwisata;
4. Pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
5. Pelaksana tugas lain dibidang pariwisata yang diberikan oleh Bupati.

Dengan potensi pariwisata yang sangat besar di Kabupaten Purbalingga dan dengan dilakukannya pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat menarik minat dari para wisatawan untuk mengunjungi lokasi-lokasi obyek wisata yang ada di Purbalingga sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 1.7
Data Jumlah Pengunjung Obyek Wisata / Taman Rekreasi
/ Tempat Hiburan Umum
& Rekreasi Kabupaten Purbalingga
Tahun 2002 s/d 2005.

No	Nama Obyek Wisata	Pengunjung (orang)				Kendaraan (buah)			
		2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
1	Gua Lawa.	48.018	52.718	57.750	59.223	2.628	84.200	24.850	
2	Pendakian Gunung Slamet.	3.750	4.000	3.333	7.264	-	-	-	
3	Wana Wisata Serang.	1.983	3.000	968	8.185	-	-	370	
4	Monjen. Soedirman.	2.667	2.228	919	1.472	-	-	-	
5	Ardi Lawét.	1.601	3.200	3.000	3.553	-	-	-	
6	Kolam Renang. Bojongsari.	36.537	8.500	12.183	349.694	229	156	737	
7	Kol.Rng. Tirta Asri.	19.881	16.537	13.633	90.746	3.740	1.768	981	
8	T.Aquarium Purbasari.	14.400	22.182	8.761	33.124	-	3.695	-	
9	Taman Curug Gringsing.	-	-	-	11.907	-	-	-	
10	Bumi Perkemahan.	-	-	-	18.116	-	-	-	
Jumlah		128.837	112.365	100.547	583.284	6.597	89.819	26.938	

Sumber : Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga 2005

Berdasarkan fenomena diatas dimana dapat kita lihat bahwa di Kabupaten Purbalingga memiliki potensi di sektor pariwisata yang apabila dapat dikelola dengan baik dan juga dikembangkan agar lebih berkualitas dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung di obyek wisata yang berada

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Sub Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata?.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Sub Dinas Pariwisata dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata?.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Sub Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang pemerintahan pada khususnya terutama strategi yang diambil oleh Dinas

Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga untuk menambah khasanah kepariwisataan yang ada.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan keterangan yang berguna bagi perumus kebijakan untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan potensi kepariwisataan di Kabupaten Purbalingga sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Teori adalah serangkaian asumsi konsep, kontrol, definisi dan praposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁷

Menurut Koentjoroningrat Teori adalah pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu didalam masyarakat.⁸

Mengacu pada teori yang dijelaskan di atas maka penulis akan menerangkan mengenai teori yang digunakan.

1. Peran

Pengertian peran menurut **Jack C. Plano, Robert E,** dan **Hellena**

S. Robin adalah sebagai berikut :

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, 1989, hlm 37.

⁸ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 9.

“Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.”⁹

Pendapat lain mengenai definisi peranan diungkapkan oleh **Block** sebagai berikut :

”Suatu konsep yang dipakai oleh sosiolog untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sosial dengan tuntunan peranan yang dilakukannya.”¹⁰

Dari pendapat diatas bahwa konsep peranan berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang atau kelompok karena tuntutan dan posisi yang didudukinya untuk mempengaruhi pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang sah bagi masyarakat.

Peranan menurut **Astrid S. Susanto** sedikitnya mengandung tiga hal yaitu:

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
3. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹¹

⁹ Jack C.Plano, Robert E, Riggs dan Hellena S Robin, terjemahan oleh Edi S. Siregar, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hlm 220.

¹⁰ Hubert M.Block, Jr, *Pengantar Penelitian Sosial*, Terjemahan Tim Penerjemah Yosogama, Rajawali Pers, 1987, hlm 105.

¹¹ Astrid S. Susanto, *Peranan Sosial dan Perubahan Sosial*, Pustaka Pelajar, 1992, hlm 65

Dari ketiga hal tersebut yang terpenting adalah interaksi antar seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada di sekitarnya. Ketika interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu yang dapat memberi pelayanan lebih serta memiliki kelebihan ganjaran social lebih sedikit akan cenderung menentukan interaksi. Dengan kata lain, individu memiliki kedudukan yang dominan atas individu yang lainnya, dimana itu mempunyai kekuasaan. Sementara itu kedudukan yang dominan dapat pula diperoleh dengan sumber yang lain. Selain kekayaan dan kehormatan, ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh secara periodik.

Status yang dimiliki seseorang tidak lepas dari peranan-peranan yang dilakukan orang tersebut kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena sistem sosial adalah bentuk interaksi yang bersifat timbal balik. Besarnya peranan seseorang terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh pada status seseorang. Demikian sebaliknya status yang tinggi adanya peranan yang sangat tinggi pula.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah lembaga atau satuan organisasi orang-orang yang perintah-perintahnya ditaati oleh rakyat. Dalam bentuknya sehari-hari dapat diuraikan sebagai suatu badan atau organisasi yang mengingatkan kepada prosedur, jenjang, negara, propinsi, kabupaten, kotamadya dan lain-lain.¹²

Menurut The Liang Gie yang dikutip oleh Mashuri Maschab yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah :¹³

"Satuan-satuan organisasi pemerintahan yang berwenang menyelenggarakan kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami wilayah."

Sedangkan menurut Mashuri Maschab sendiri :¹⁴

"Pemerintah Daerah adalah satuan aparatur negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara."

Jadi pemerintah daerah adalah organisasi yang memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan didaerahnya.

3. Dinas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri atas unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintah, bagian kesembilan tentang perangkat daerah pasal 124 ayat 1,2, dan 3 disebutkan bahwa ; (1)

¹³ Mashuri Maschab, Pemerintahan di Daerah, Fisip UGM, Yogyakarta. 1982, hlm. 32.

¹⁴ Victor M. Situmorang dan Gernantoro S. Ilmu Pemerintahan, Fisipal UGM, Yogyakarta. 1976

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah, (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut **Boediono** dikemukakan bahwa pendapatan atas income dari seseorang warga adalah hasil dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada faktor produksi.¹⁵

Pendapatan Asli Daerah adalah totalitas perolehan dan penerimaan daerah, berupa uang atau dapat dinilai dengan uang yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh daerah sebagai usaha daerah yang bukan pemberian atau sumbangan dari pemerintah pusat.

Bagi daerah yang mengembangkan industri pariwisata di daerahnya, lalu lintas wisatawan ternyata membawa hasil yang tidak sedikit dan dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah dimana dari sektor pariwisata ini bisa tergali pajak daerah dan retribusi daerah yang kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah sangat signifikan. Pajak daerah dan retribusi daerah ini bisa tercipta dari sektor yang bersangkutan dengan kepariwisataan.

5. Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan sebagaimana digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan sebagai berikut :¹⁶

- a. Pengembangan pariwisata ditingkatkan dengan mendayagunakan sumber potensi yang ada, sehingga dapat menjadi kegiatan ekonomi untuk :
 - Memperbesar penerimaan devisa.
 - Memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja sehingga pariwisata akan mendorong pembangunan daerah.
- b. Memperkenalkan nilai-nilai budaya bangsa dan meningkatkan kualitas kebudayaan nasional dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup bangsa.
- c. Pembangunan pariwisata dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor lain serta antar pengusaha pariwisata agar mereka dapat saling menunjang.
- d. Pariwisata dalam negeri harus dikembangkan dan diarahkan untuk :
 - Memupuk cinta tanah air dan bangsa.
 - Menanamkan semangat jiwa dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Menciptakan iklim yang menarik melalui pengembangan obyek wisata, kegiatan promosi, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

¹⁶ *Undang-Undang Dasar dan Peraturan Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: ANEKA YAMUKATA 2001, hlm. 25

dan latihan pariwisata serta meningkatkan mutu pelayanan yang dilakukan bersama sektor lainnya.

- f. Menciptakan iklim pariwisata dikalangan masyarakat agar dapat berperan secara aktif maupun pasif sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan kehidupan bangsa dan masyarakat.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian suatu daerah atau negara. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata akan selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak, sebagaimana diketahui bahwa dalam pengembangan pariwisata tersebut akan melibatkan berbagai proyek misalnya: penerangan, transportasi, jalan dan lain-lain.

Pengembangan dan pengelolaan pariwisata merupakan peningkatan kualitas maupun kuantitas obyek wisata, peningkatan sarana wisata di dalam obyek wisata serta peningkatan prasarana yang mendukung aktivitas pariwisata seperti hotel, rumah makan, tempat hiburan dan biro perjalanan. Sehingga diharapkan dapat menarik minat pengunjung atau wisatawan untuk datang ke obyek wisata yang ada.

6. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain bersifat sementara dilakukan oleh perorangan atau kelompok

.....

dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial budaya, alam dan ilmu.¹⁷

Menurut UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata istilah pariwisata berhubungan dengan pengertian wisata yaitu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian dari pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

b. Manfaat Pariwisata

Manfaat pariwisata didalam pembangunan mencakup beberapa segi yaitu :

- Segi Ekonomi

Bahwa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperluas dasar-dasar perekonomian suatu negara.

- Segi Seni Budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah untuk memenuhi rasa untuk memenuhi rasa

keingintahuan, mengagumi, atau menyelami seni budaya di daerah yang dikunjungi.

- **Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup**

Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan tidak terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya apabila dibina secara baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan alam yang terlantar.

- **Memperluas Nilai-Nilai Pergaulan Hidup dan Pengetahuan**

Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain, manusia akan menghargai nilai-nilai yang dimilikinya.

- **Memperluas Kesempatan Kerja**

Industri pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap kebutuhan tenaga kerja, tidak hanya mementingkan mesin-mesin saja. Sebagai industri yang sifatnya melayani maka disamping membutuhkan unsur cepat, aman, murah, mudah, dan nikmat juga ramah. Apabila rangkaian itu dilengkapi dengan tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko souvenir, dan sebagainya maka jumlah tenaga kerja akan semakin banyak lagi.

- **Menunjang Perbaikan Kesehatan dan Prestasi Kerja**

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana yang baru maupun lingkungan baru walaupun hanya untuk sementara waktu.

c. Sasaran Pariwisata

Pada dasarnya sasaran pariwisata itu ditujukan pada masyarakat umum tanpa memandang status sosialnya dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan suasana yang lain atau baru dari rutinitas sehari-hari. Sasaran pariwisata bagi masyarakat umum ini dapat dibagi menjadi dua bagian :

- **Bagian wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan domestik**

Sasaran pariwisata ini khusus ditujukan bagi masyarakat didalam negeri itu sendiri.

- **Bagi masyarakat luar negeri atau wisatawan mancanegara**

Sasaran pariwisata ini ditujukan bagi wisatawan mancanegara agar mereka tertarik untuk datang berkunjung tentunya dengan menonjolkan kelebihan atau daya tarik dari suatu obyek wisata.

7. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga

a. Tugas Pokok Dinas Pariwisata

Tugas pokok Sub Dinas Pariwisata adalah menyiapkan bahan

perencanaan, kebijakan, teknis, merencanakan, mengkoordinasikan

melaksanakan fasilitasi, pembinaan serta mengevaluasi pelaksanaan program bidang pariwisata.¹⁸

b. Fungsi Sub Dinas Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :¹⁹

- Penyusunan program kerja, analisis dan evaluasi bidang pariwisata.
- Pembinaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum, menyiapkan perizinan dibidang pariwisata, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan wisata.
- Pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja wisata, menyiapkan perizinan dibidang perusahaan akomodasi, rumah makan dan bar serta hotel, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata.
- Pembinaan dan pengembangan dan pengembangan pemasaran, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran serta penyuluhan wisata.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan atas tugas dan fungsi Sub Dinas Pariwisata tersebut di atas, dalam menjalankan perannya maka diperlukan sebuah program untuk mempermudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Program-

¹⁸ Peraturan Bupati Babelinda Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Organisasi, Tugas Pokok dan

program yang dimiliki oleh Sub Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata. (2002).
- b. Program Pembangunan Sarana dan Parasarana Pariwisata. (2003).
- c. Program Pengembangan Kepariwisata Daerah. (2004).
- d. Program Pengembangan dan Pembinaan Kepariwisata Daerah. (2005).

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi Konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

1. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD.
3. Pariwisata adalah proses segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan wisata termasuk obyek atau daya tarik wisata sehingga orang tertarik mengunjunginya.
4. Pendapatan Asli Daerah adalah totalitas perolehan dan penerimaan daerah dapat berupa yang ataupun dapat dinilai dengan uang yang berasal dari

sumber-sumber yang dimiliki oleh daerah, sebagai usaha daerah yang bukan pemberian atau sumbangan dari pemerintah daerah.

5. Peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan kualitas maupun kuantitas obyek wisata, meningkatkan sarana wisata di dalam obyek wisata serta meningkatkan prasarana yang mendukung aktivitas pariwisata yang terangkum dalam tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata dan dijalankan melalui program dan kegiatan dinas pariwisata.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah bagaimana cara menggunakan atau melihat sesuatu variabel sehingga penelitian ini akan benar-benar terarah dengan baik dan jelas.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi definisi operasional adalah merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur.²⁰

Indikator-indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Sub Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata.
 - a. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Pariwisata.
 - Rehabilitasi MTL Jendral Soedirman.
 - Pembinaan Promosi Pariwisata.

b. Program Pembangunan Sarana dan Parasarana Pariwisata.

- **Proyek DED Wisata Air Bojongsari.**

c. Program Pembangunan Kepariwisataaan Daerah.

- **Pengembangan Wisata air Bojongsari.**
- **Pemilihan Kakang Mbekayu.**
- **Pengadaan Alat Promosi dan Pemasaran Wisata.**
- **Promosi dan Pemasaran Pariwisata.**

d. Program Pengembangan dan Pembinaan Kepariwisataaan Daerah.

- **Promosi dan Pemasaran Pariwisata.**
- **Pemilihan dan Pengiriman Kakang Mbekayu.**
- **Pengiriman Duta Wisata.**
- **Pembangunan Gapura Kantor Pengelola Locket Ardi Lawet.**
- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Buper Munjulluhur.**
- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Curug Gringsing.**
- **Pembangunan Pagar Keliling Pondok Pemuda.**
- **Penyelesaian Pembangunan Wisata Air Bojongsari (luncuran).**
- **Pembangunan Wisata Air Bojongsari.**

2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata ;

a. Faktor Pendukung :

- **Pemilihan Duta Wisata.**

b. Faktor Penghambat :

- Masalah Harga Tanah.
- Dana / Keuangan.
- Sumber Daya Manusia.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang pada hakikatnya berusaha untuk mencari pemahaman makna berdasarkan faktor atau pemahaman yang ada dilokasi penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan dan penganalisaan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas serta sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang ada.²¹

2. Unit Analisis

Untuk mendapatkan data yang akurat maka penulis melakukan penelitian di instansi yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu :

- a. Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
- b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer yaitu :

Data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan.

²¹ Noto Atmo Soedjono, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 00

b. Data Sekunder yaitu :

Data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi atau Pengamatan

Yang dimaksud dengan observasi atau pengamatan adalah melihat permasalahan secara seksama dan tidak hanya melihat, tetapi juga memperhatikan sungguh-sungguh dengan mencatat setiap permasalahan jika perlu menanyakan kepada pihak yang bersangkutan.

b. Interview atau Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan jalan wawancara atau kuisioner lisan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden.

c. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti mengenai hal-hal atau variabel yang berupa benda-benda tertulis serta buku-buku, dokumen-dokumen, perundang-undangan, majalah notulen rapat, catatan harian dan lain-lain

5. Teknik Analisa Data

Menurut Winarno Surachmad, peneliti yang bersifat kualitatif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada.²² Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Data yang digunakan adalah data-data yang telah tersedia, data tersebut berupa dokumentasi atau hasil wawancara.

Analisa dengan metode kualitatif ini digunakan karena menyesuaikan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yang cenderung mengumpulkan data yang banyak dan juga karena metode ini menggunakan analisa yang mengajukan secara langsung hakekat dari permasalahan yang diangkat disesuaikan dengan teori-teori yang dipergunakan.

²² *Ibid*, hal 65